



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SETINA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 719863

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.301.475.600**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1739 m2/100 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 142.972.000
2. Tanah Seluas 710 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 45.440.000
3. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 15.300.000
4. Tanah Seluas 780 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 10.920.000
5. Tanah Seluas 647 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
6. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
7. Tanah Seluas 15838 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 26.924.600
8. Tanah dan Bangunan Seluas 310 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 355.956.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 168.660.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 349 m2/199 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 400.303.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/36 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 177.000.000

1. MOBIL, NISSAN MARCH Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
50.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
14.500.000
3. MOTOR, TOYOTA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
97.000.000
4. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
15.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 12.100.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 305.709.900

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.796.285.500

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.796.285.500

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.